

ABSTRAK

SUGENG SANTOSO. IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

Latar belakang penelitian ini adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak merupakan salah satu sumber pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai apakah pembuatan Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah telah memenuhi azas-azas pembuatan peraturan, bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam menunjang Otonomi Daerah di Kota Tangerang Selatan, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah), selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah, serta peran pajak daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dalam menunjang otonomi daerah.

Survey dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini untuk mengetahui dan memahami kondisi dan situasi penelitian secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh, selain itu untuk memperoleh informasi dan data yang sangat rinci khususnya mengenai implementasi Perda Pajak di Tangerang Selatan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, adapun data yang ditemukan di lapangan hanya merupakan data pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah memenuhi kriteria pembuatan peraturan daerah, tetapi masih ada yang bertentangan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu azas keterbukaan yang terdapat pada pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk pelaksanaan Perda No 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan baik. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan adalah kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih, belum optimalnya pemungutan yang sesuai dengan potensi pajak sebagaimana telah direncanakan, kurangnya sosialisasi Perda No.7 Tahun 2010 kepada wajib pajak, koordinasi yang belum optimal antara masing-masing SKPD dan juga antara SKPD dengan pihak eksternal, kurangnya kesadaran wajib pajak daerah, kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata, pengolahan data yang belum tertata secara baik, pemetaan wilayah (*mapping*) tentang potensi pajak, pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata, dan jabatan struktural sebagian masih belum terisi.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu mengakomodir masukan masyarakat secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi untuk menyempurnakan/merevisi Perda No 7 Tahun 2010. Agar Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Pajak Daerah Kota Tangerang efektif perlu adanya sosialisasi berkesinambungan yang dilakukan sehingga masyarakat mengetahui tentang isi perda pajak serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan, juga perlu meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan, serta mengadakan pendidikan khusus tentang pelatihan penilai dibidang perpajakan, perlu adanya perekrutan tenaga honorer yang ahli dibidang perpajakan, dinas terkait harus melakukan inventarisasi potensi pajak.

Kata kunci : Pajak Daerah, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

SUGENG SANTOSO. IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS NUMBER 7 OF 2010 ON LOCAL TAXES IN SUPPORTING REGIONAL AUTONOMY IN SOUTH TANGERANG CITY

The background of this research is the need for a strong legal basis for the government to levy taxes to the community, in the era of regional autonomy, and the tax is one source of regional development. This study aimed to get an answer as to whether Local Regulation Number 7 of 2010 concerning local tax compliance rulemaking principles, how the effectiveness of the implementation of Local Regulation Number 7 of 2010 on Regional Taxes in support of Regional Autonomy in South Tangerang, and what factors are an obstacle in the implementation of the Regional Tax collection in the South Tangerang City.

This study uses an empirical approach to investigate normative legal problems by means of the synchronization and consistency of legislation on local taxes (Law, Government Regulation and Local Regulation), further constraints faced in the collection of local taxes, as well as the role of local tax themselves to the implementation of development in the area in support of regional autonomy.

The survey was conducted using a qualitative descriptive approach. The approach is to know and understand the conditions and situation of the overall study as an integrated whole, in addition to information and data is very detailed especially on the Local Regulations Number 7 of 2010 on Local Taxes in South Tangerang City. Form study is normative studies using normative is an approach based on the laws and regulations, while the data is found in the field is only supporting data.

Based on this research, in general Local Regulation Number 7 of 2010 on Regional Taxes rulemaking meets the criteria area, but there are conflicting with one of the principles of legislation forming the openness principle contained in article 5 of Law Number 12 of 2011 on Establishment Regulation Legislation. For the implementation of Local Regulation Number 7 of 2010 on Regional Taxes have been implemented by the Department of Revenue and Asset

Management District (DPPKAD) well. While the constraints faced in the implementation of tax collection in South Tangerang city area is lack of availability of trained personnel collector, not optimal according to the potential collection of taxes as had been planned, lack of socialization Local Regulation Number 7 of 2010 to the taxpayer, coordination has not optimally between each Local Government Unit (SKPD) and also between Local Government Unit (SKPD) with external parties, the lack of awareness of local taxpayers, abilities and skills that employees have not been evenly distributed, data processing has not arranged properly, the mapping of the potential tax, employee understanding of the functioning of the and procedures have not been evenly distributed, and most of the structural position is still not filled.

Therefore, South Tangerang City Government needs to accommodate public opinion orally and / or in writing to do over, public hearings, working visits, socialization, and / or, seminars, workshops, and / or discussions to refine / revise Local Regulation Number 7 of 2010. In order for the Implementation of Local Regulation Number 7 of 2010 on Regional Tax effectively, South Tangerang City Government need for continuous socialization is done so that people know about the content of tax regulations and to improve the facilities and infrastructure required to support the local tax collection in South Tangerang city, and also needs to improve the quality of human resources in the field of taxation, as well as holding special education training assessors taxation, the need for recruitment of temporary employees who are experts in the field of taxation, the relevant agencies should conduct an inventory of potential taxes.

Key words: Regional Taxes, Regional Development, Regional Autonomy